

2015

# PELAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS

DANAR SUTOPO SIDIG

IKA NURAZISAH

ZIA'ULHAQ AS SHIDQI



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Sistem Akuntansi Universitas” yang merupakan salah satu tugas mata kuliah Akuntansi Pemerintah.

Dalam makalah ini kami membahas mengenai Sistem Akuntansi Universitas dimulai dari penjournalan hingga pelaporan.

Dalam menyelesaikan makalah ini, kami banyak mendapat sumber dari buku–buku dan internet. Kami menyadari karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian diharapkan makalah ini dapat bermanfaat bagi kami dan orang–orang yang membacanya. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk dapat memperbaiki makalah ini.

Makassar, 2015

Tim Penulis,

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	1
BAB II PEMBAHASAN .....	2
2.1 Pola Pengelolaan Keuangan Universitas.....	2
2.1.1 Badan Hukum (PTN BH) .....	3
2.2.2 Badan Layanan Umum .....	5
2.2 Penyusunan Laporan Keuangan Universitas PTN BH.....	8
2.2.1 Format Laporan Keuangan .....	9
2.2.2 Jurnal-Jurnal Standar .....	18
2.3 Penyusunan Laporan Keuangan Universitas BLU.....	19
2.3.1 Format Laporan Keuangan .....	20
2.3.2 Jurnal-Jurnal Standar .....	32
BAB III SIMPULAN.....	33
3.1 Simpulan.....	34
DAFTAR PUSTAKA .....	35
LAMPIRAN.....	36

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Format Laporan Posisi Keuangan Universitas PTN BH.....	10
Gambar 2.2 Format Laporan Aktivitas Universitas PTN BH.....	13
Gambar 2.3 Format Laporan Arus Kas Universitas PTN BH .....	15
Gambar 2.4 Format Neraca Universitas BLU.....	22
Gambar 2.5 Format Laporan Realisasi Anggaran.....	24
Gambar 2.6 Format Laporan Operasional Universitas BLU .....	27
Gambar 2.7 Format Laporan Arus Kas Universitas BLU.....	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip, metode, dan teknik pencatatan dan pengorganisasian data keuangan atas operasi atau kegiatan suatu entitas untuk menghasilkan dan memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional. Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Untuk itulah perlu dibentuknya sistem akuntansi yang baik yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing entitas. Sama halnya dengan universitas pemerintah yang sudah seyogyanya melaksanakan pengelolaan keuangannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Saat ini ada dua kategori universitas pemerintah terkait pengelolaan keuangannya yaitu Universitas sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dan Universitas sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Ini menandakan bahwa semua Universitas di Indonesia dituntut untuk melaksanakan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Universitas di Indonesia saat ini semakin kompleks dalam melakukan pelayanan dan juga sumber pendanaannya. Suatu universitas selain bergerak di bidang pendidikan bisa melaksanakan pelayanan lainnya seperti rumah sakit dan asrama. Sumber pendanaan pun bisa berasal dari APBN, dana masyarakat dan pendapatan lainnya. Untuk itulah diperlukan suatu sistem akuntansi universitas sebagai pedoman dalam mengelola keuangan sehingga bisa menghasilkan laporan yang akuntabel dan memadai.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimana sistem akuntansi universitas yang diterapkan universitas di Indonesia?
2. Bagaimana universitas menyusun laporan keuangannya dimulai dari pencatatan dan penjurnalan hingga pelaporannya?

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Pola Pengelolaan Keuangan Universitas**

Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja memiliki karakteristik bahwa arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada *input* tetapi pada *output* (Dwiyanto, 2005). Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang makin terbatas, tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan dana yang makin tinggi. Penganggaran yang berorientasi pada *output* merupakan praktik yang telah dianut luas oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Selain itu, reformasi keuangan Negara juga dimaksudkan untuk menjamin terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Program inovasi pengelolaan perguruan tinggi ini bertujuan agar perguruan tinggi bisa mengembangkan perannya baik dalam menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan produktif, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, pembangunan daerah dan nasional, serta menjadi pemersatu bangsa dan mengawal perjalanan demokratisasi bangsa. Perguruan tinggi harus mandiri (otonom), sehat, dan bermutu. Pembentukan badan hukum milik negara yang telah dimulai sejak tahun 2000 memerlukan kerangka hukum agar otonomi bisa efektif dalam meningkatkan tata kelola perguruan tinggi disertai dengan akuntabilitas yang terukur.

Sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, program peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan tinggi dilaksanakan melalui penyusunan perangkat hukum operasional dalam rangka mencapai status badan hukum perguruan tinggi sebagai bentuk otonomi yang paling optimal, akuntabel, dan dengan penekanan bahwa institusi pendidikan bersifat nirlaba. Sebagai bagian dari transisi menuju perguruan tinggi yang berbadan hukum dan mandiri, pemerintah mendorong PTN untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) agar lebih efektif dan efisien dalam mengelola keuangannya.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan amanat Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik

oleh Pemerintah, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang pada saat itu bentuk dan modelnya beraneka macam. Jenis BLU di sini antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain. Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. BLU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia seharusnya telah menerapkan manajemen keuangan berbasis kinerja agar terjadi keseragaman dalam mengikuti aturan menteri keuangan sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan dan informasi yang diketahui, sistem keuangan yang sekarang diterapkan masih belum berbasis kinerja. Sejumlah fenomena yang tampak antara lain pembagian kompensasi, insentif atau kesejahteraan lainnya hanya didasarkan pada prinsip pemerataan sehingga seringkali menjadi pemicu munculnya kecemburuan sosial yang berdampak terhadap menurunnya kinerja pegawai. Fenomena lainnya yang pengelolaannya cenderung tidak transparan adalah penyusunan anggaran yang tidak melibatkan dan koordinasi dengan pimpinan terkait, serta penunjukkan langsung kegiatan ditentukan tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Kondisi ini disinyalir kurang mendukung proses transparansi dan akuntabilitas seperti yang dipersyaratkan dalam sistem BLU.

#### **2.1.1. Badan Hukum (PTN BH)**

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom (PMK No. 225 Tahun 2014). Kesiapan untuk melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi secara otonom tersebut ditunjukkan melalui evaluasi diri yang menyeluruh baik dalam aspek program akademik, sumberdaya manusia (SDM), sarana-prasarana, maupun keuangan. Namun, pemberian otonomi tidak berarti pemerintah melepaskan diri dari tanggung jawab di bidang pendidikan.

Pemerintah membuka kemungkinan secara selektif kepada Perguruan Tinggi Negeri yang dinilai sudah memiliki kemampuan pengelolaan yang mencukupi untuk dapat memiliki kemandirian, otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar untuk diubah status hukumnya menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang dapat berperan sebagai kekuatan moral

dalam proses pembangunan masyarakat madani yang lebih demokratis dan mampu bersaing secara global. Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Hukum tetap menjadi aset negara yang berharga untuk memperbaiki citra bangsa.

Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus sebagai Badan Hukum merupakan bentuk perguruan tinggi yang memiliki lima prinsip utama dalam penyelenggaraannya, yaitu kualitas, otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi. Kelima prinsip tersebut akhirnya menjadi paradigma baru bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam rangka melaksanakan prinsip akuntabilitas, PTN BH harus memberikan laporan tahunan berupa (PMK No. 225 Tahun 2014):

- a. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih
- b. Laporan akademik berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai universitas
- c. Laporan ketenagakerjaan universitas yang meliputi keadaan, kinerja, dan kemajuan yang telah dicapai.

Laporan tahunan tersebut disampaikan kepada Majelis Wali Amanat sebagai lembaga tertinggi dalam Perguruan tinggi berstatus sebagai Badan Hukum. Pengelolaan keuangan bagi PTN Badan Hukum Tahun Anggaran 2014 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2014 Tahun 2014 berlaku untuk:

- a. Institut Teknologi Bandung
- b. Institut Pertanian Bogor
- c. Universitas Gadjah Mada
- d. Universitas Indonesia
- e. Universitas Pendidikan Indonesia
- f. Universitas Sumatera Utara
- g. Universitas Airlangga.

Dan tambahan universitas berdasarkan PP Nomor 80, 81, 82, dan 83 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 yaitu:

- a. Universitas Padjajaran (Unpad)
- b. Universitas Diponegoro (Undip)
- c. Universitas Hasanudin (Unhas)
- d. Institut Teknologi Surabaya (ITS).



Agar penerimaan dan penggunaan dana Universitas dapat disajikan dengan akuntabel dan transparan maka Universitas setiap akhir semester dan akhir tahun buku menyusun 3 (tiga) laporan keuangan:

1. Laporan Keuangan yang menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Dana APBN yang menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah
2. Laporan Keuangan yang menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Dana Masyarakat yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan
3. Laporan Keuangan Universitas secara keseluruhan yaitu Laporan Keuangan yang berisikan pertanggungjawaban penggunaan Dana APBN dan Dana Masyarakat.

Penyusunan Laporan Keuangan Universitas menggunakan basis akrual. Artinya standar akuntansi tersebut mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD yang dimodifikasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Semua ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan berlaku untuk pelaporan keuangan universitas kecuali sesuai dengan spesifik dinyatakan lain.

Prosedur pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum menetapkan bahwa semua penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disimpan atau disetorkan ke kas Negara (KPPN). Penerimaan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi dan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota, Dana Masyarakat (bersumber dari SPP mahasiswa dan lainlain), serta usaha/penjualan jasa universitas dan lain-lain disetorkan ke Rekening Universitas, untuk dimanfaatkan menurut keperluannya dengan mengacu kepada anggaran yang telah disahkan. Pimpinan Universitas menetapkan alokasi dan batas alokasi anggaran seperti misalnya bagian pembiayaan honorarium, kegiatan administrasi pemeliharaan, pengembangan staf, dan lain-lain.

### **2.1.2. Badan Layanan Umum**

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat. Setiap transaksi keuangan badan layanan umum harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Demikian pula akuntansi dan laporan keuangan badan layanan umum diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi, badan layanan umum dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan menteri keuangan. Berarti, penggunaan standar akuntansi industri spesifik tidak boleh digunakan secara langsung oleh Badan Layanan Umum, karena dapat dibatalkan atau batal demi hukum diakibatkan tidak ada persetujuan menteri keuangan. DIPA Badan Layanan Umum sekurang-kurangnya memuat:

- a. seluruh pendapatan dan belanja BLU;
- b. proyeksi arus kas;
- c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan;
- d. rencana penarikan dana yang bersumber dari APBN;
- e. besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.

Dalam hal DIPA BLU belum disahkan oleh Menteri Keuangan, BLU dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu. DIPA BLU yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan menjadi lampiran dari *contractual performance agreement* yang ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga dengan pimpinan BLU yang bersangkutan dan sekaligus menjadi dasar penarikan dana. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Layanan Umum mengikuti pedoman sebagai berikut:

a. Pada BLU Penuh

Satuan kerja berstatus BLU Penuh diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain dapat langsung menggunakan seluruh PNBP dari pendapatan operasional dan nonoperasional, di luar dana yang bersumber dari APBN, sesuai RBA tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Rekening Kas Negara. Apabila PNBP melebihi target yang ditetapkan dalam RBA tetapi masih dalam ambang batas fleksibilitas, kelebihan tersebut dapat digunakan langsung mendahului pengesahan revisi DIPA. Terhadap kelebihan PNBP yang melampaui ambang batas fleksibilitas, dapat digunakan dalam tahun berjalan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan atau menjadi saldo awal tahun berikutnya.

b. Pada BLU Bertahap

Satuan kerja berstatus BLU Bertahap dapat menggunakan PNBPN sebesar persentase yang telah ditetapkan. Sedangkan PNBPN yang dapat digunakan langsung adalah sebesar persentase yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan satker yang menerapkan PK-BLU yang bersangkutan. Satuan kerja berstatus BLU Bertahap menyetor penerimaan PNBPN yang tidak digunakan langsung ke Rekening Kas Negara secepatnya. PNBPN yang telah disetor dapat dipergunakan kembali sebesar selisih antara PNBPN yang dapat digunakan dengan PNBPN yang telah digunakan langsung.

Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan. BLU setidaknya-tidaknya mengembangkan tiga sistem akuntansi yang merupakan sub sistem dari sistem akuntansi BLU, yaitu sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi aset tetap, dan sistem akuntansi biaya.

Sistem Akuntansi Keuangan menghasilkan laporan keuangan pokok berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia /standar akuntansi industri spesifik dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan sesuai dengan SAK digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada pengguna umum laporan keuangan BLU dalam hal ini adalah *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan BLU. Sedangkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP digunakan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan BLU dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

Sistem Akuntansi Aset Tetap menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset. Sistem ini menyajikan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU ataupun bukan milik BLU tetapi berada dalam pengelolaan BLU. Pengembangan Sistem Akuntansi Aset Tetap diserahkan sepenuhnya kepada BLU yang bersangkutan. Namun demikian, BLU dapat menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

BLU mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya yang menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, dan evaluasi varian. Sistem

Akuntansi Biaya berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan.

Pimpinan BLU bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab pimpinan BLU.

BLU menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). BLU merupakan satker kementerian negara/lembaga, oleh karena itu laporan keuangan BLU dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. Konsolidasi laporan keuangan dapat dilakukan jika digunakan prinsip-prinsip akuntansi yang sama. BLU menggunakan SAK sedangkan laporan keuangan kementerian negara/lembaga menggunakan SAP, karena itu BLU mengembangkan sub sistem akuntansi yang mampu menghasilkan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Komponen Laporan Keuangan BLU yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga meliputi, Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Operasional dan Neraca.

## **2.2 Penyusunan Laporan Keuangan Universitas PTN BH**

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Tahun Anggaran 2014, laporan keuangan PTN Badan Hukum Tahun Anggaran 2014 disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi yang berkedudukan di Indonesia. Laporan keuangan tersebut terdiri dari:

- a. Laporan Aktivitas/Operasional;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Di samping itu, dalam rangka konsolidasi laporan keuangan, PTN Badan Hukum menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan berdasarkan SAI ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan tersebut menjadi lampiran dari laporan keuangan yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi Instansi.

Pembahasan terkait pelaporan keuangan universitas yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum tersebut akan dibahas secara mendalam pada subbab C. Pelaporan Keuangan Universitas BLU. Oleh karena ini, subbab ini akan berfokus pada pembahasan laporan keuangan universitas yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **2.2.1 Format Laporan Keuangan**

#### **1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Universitas PTN BH**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, laporan keuangan universitas PTN BH disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Di samping itu, pasal 62 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Selanjutnya, pasal 63 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. nirlaba;
- d. penjaminan mutu; dan
- e. efektivitas dan efisiensi.

Prinsip “nirlaba” sebagaimana dinyatakan dalam huruf c di atas menjadi dasar bagi Universitas PTN BH untuk menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 (Revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba sebagai dasar dalam penyusunan pelaporan keuangannya. Paragraf 9 PSAK 45 tersebut mengatur bahwa jenis-jenis laporan keuangan entitas nirlaba adalah sebagai berikut.

- a. Laporan posisi keuangan (neraca);
- b. Laporan aktivitas;
- c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan.

Bagaimana keempat laporan keuangan tersebut disusun dalam praktik di lapangan dapat dilihat pada Lampiran 1: Laporan Keuangan Universitas Indonesia Tahun 2014. Adapun pembahasan secara teoritis atas setiap jenis laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut.

## 2. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Paragraf 10 PSAK 45 menyatakan bahwa laporan posisi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset netto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak-pihak lain untuk menilai:

- a. kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan
- b. likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset netto. Format laporan posisi keuangan bagi universitas PTN BH yang disusun berdasarkan PSAK 45 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Format Laporan Posisi Keuangan Universitas PTN BH

<b>Universitas XYZ</b>	
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>	
<b>Per 31 Desember 20xx</b>	
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
<b>ASET</b>	
<b>Aset Lancar</b>	
Kas dan Setara Kas	xxx
Uang Muka	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx
Piutang (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu)	xxx
Biaya Dibayar Di Muka	xxx
Persediaan	xxx
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>xxx</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>	
Investasi Jangka Panjang	xxx
Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan)	xxx
Aset Lain-lain	xxx

<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>xxx</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>xxx</b>
<b>LIABILITAS DAN ASET NETO</b>	
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Hutang Pajak	xxx
Biaya yang Masih Harus Dibayar	xxx
Hutang Lain-lain	xxx
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>xxx</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Hutang Lain-lain	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx
Kewajiban Imbalan Paskakerja	xxx
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>xxx</b>
<b>Aset Neto</b>	
Aset Neto Tidak Terikat	xxx
Aset Neto Terikat Temporer	xxx
Aset Neto Terikat Permanen	xxx
<b>Jumlah Aset Neto</b>	<b>xxx</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Aset Neto</b>	<b>xxx</b>

Sumber: Universitas Indonesia (2014).

Karakteristik yang membedakan laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK 45 di atas dengan laporan posisi keuangan yang disusun oleh perusahaan sektor privat adalah pada bagian pelaporan aset neto. Laporan posisi keuangan pada perusahaan sektor privat bukan menyajikan aset neto, melainkan ekuitas. Aset neto baik pada laporan keuangan universitas PTN BH maupun laporan keuangan entitas nirlaba lainnya terdiri atas tiga katagori sebagai berikut.

a. Aset Neto Tidak Terikat

Paragraf 18 PSAK 45 menyatakan bahwa aset neto tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset neto tidak terikat dapat berasal dari sifat entitas nirlaba (dalam hal ini universitas PTN BH). Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Contoh aset neto tidak terikat sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Universitas Indonesia (2014:30) adalah aset neto yang dapat berasal dari

- pendapatan biaya pendidikan,

- pendapatan APBN,
- pendapatan penelitian,
- pendapatan seminar dan pelatihan, dan
- lain-lain.

b. Aset Neto Terikat Temporer

Paragraf 17 PSAK 45 menyatakan bahwa pembatasan temporer terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu di masa depan, atau (4) pemerolehan aset tetap, dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan.

Adapun contoh aset neto terikat temporer dalam laporan keuangan universitas PTN BH adalah sebagaimana yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Universitas Indonesia (2014:31), yaitu:

- aset neto terikat temporer yang berasal dari penelitian,
- aset neto terikat temporer yang berasal dari beasiswa, dan
- aset neto terikat temporer yang berasal dari hibah/sumbangan.

c. Aset Neto Terikat Permanen

Paragraf 16 PSAK 45 menyatakan bahwa pembatasan permanen terhadap (1) aset, seperti tanah atau karya seni, yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau (2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (*endowment*).

3. Laporan Aktivitas

Paragraf 19 PSAK 45 menyatakan bahwa tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:

- a. pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto,
- b. hubungan antartransaksi, dan peristiwa lain, serta



- c. bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditur, dan pihak lainnya untuk:

- mengevaluasi kinerja dalam suatu periode,
- menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa, serta
- menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset netto selama suatu periode. Perubahan aset netto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset netto atau ekuitas dalam posisi keuangan. Format laporan aktivitas bagi universitas PTN BH yang disusun berdasarkan PSAK 45 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.2 Format Laporan Aktivitas Universitas PTN BH

<b>Universitas XYZ</b> <b>Laporan Aktivitas</b> <b>Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx</b> (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
<b>PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT</b>	
<b>Pendapatan</b>	
Operasional	xxx
APBN	xxx
Hibah/Sumbangan	xxx
Lain-lain	xxx
	xxx
Aset Netto yang Berakhir Pembatasannya	xxx
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>xxx</b>
<b>Beban</b>	
Operasional	xxx
Penyusutan dan Amortisasi	xxx
Lain-lain	xxx
<b>Jumlah Beban</b>	<b>xxx</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Aset Netto Tidak Terikat</b>	<b>xxx</b>
<b>PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER</b>	
<b>Pendapatan</b>	
Operasional	xxx
Hibah/Sumbangan	xxx
Lain-lain	xxx
	xxx
Aset Netto Terbebaskan dari Pembatasan	(xxx)
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>xxx</b>

<b>Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Terikat Temporer</b>	<b>xxx</b>
<b>PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN</b>	
<b>Pendapatan</b>	
Lain-lain	xxx
Aset Neto Terbebaskan dari Pembatasan	(xxx)
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>xxx</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Terikat Permanen</b>	<b>xxx</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</b>	<b>xxx</b>
<b>Aset Neto Awal Tahun</b>	<b>xxx</b>
Koreksi Saldo Awal	xxx
Kenaikan (Penurunan Efek Tersedia untuk Dijual)	xxx
<b>Aset Neto Akhir Tahun</b>	<b>xxx</b>

Sumber: Universitas Indonesia (2014).

Berdasarkan format laporan aktivitas di atas, laporan tersebut menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Paragraf 23, 24, dan 25 PSAK 45 mengatur perlakuan akuntansi pendapatan, beban, serta keuntungan dan kerugian sebagai berikut.

- Pendapatan diakui sebagai penambah aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat.
- Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.
- Keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) diakui sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Paragraf 26 PSAK 45 menyatakan bahwa pengkalisifikasian pendapatan, beban, serta keuntungan dan kerugian dalam kelompok aset neto tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Misalnya, dalam suatu kelompok atau beberapa kelompok perubahan dalam aset neto, entitas nirlaba dapat mengklasifikasikan unsur-unsurnya menurut kelompok operasi atau nonoperasi, dapat dibelanjakan atau tidak dapat dibelanjakan, telah direalisasi atau belum direalisasi, berulang atau tidak berulang, atau dengan cara lain.

#### 4. Laporan Arus Kas

Paragraf 33 PSAK 45 menyatakan bahwa tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Format laporan arus kas bagi universitas PTN BH yang disusun berdasarkan PSAK 45 dengan pendekatan tidak langsung adalah sebagai berikut.

Gambar 2.3 Format Laporan Arus Kas Universitas PTN BH

<b>Universitas XYZ</b> <b>Laporan Arus Kas</b> <b>Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx</b> (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
<b>Kenaikan Aset Neto</b>	<b>xxx</b>
<b>Penyesuaian:</b>	
Penyusutan	xxx
Koreksi Aset Neto	xxx
Imbalan Paskakerja	xxx
Laba (Rugi) Efek Tersedia untuk Dijual	xxx
<b>Perubahan Modal Kerja:</b>	
Uang Muka	xxx
Piutang	xxx
Biaya Dibayar Dimuka	xxx
Persediaan	xxx
Aset Lain-lain	xxx
Hutang Pajak	xxx
Biaya yang Masih Harus Dibayar	xxx
Hutang Lain-lain	xxx
Pendapatan Diterima Di Muka	xxx
<b>Arusk Kas Bersih yang Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Operasi</b>	<b>xxx</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Perolehan Efek Tersedia untuk Dijual dan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	xxx
Pelepasan Efek Tersedia untuk Dijual dan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	xxx
Perolehan Aset Tetap	xxx
<b>Arusk Kas Bersih yang Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Investasi</b>	<b>xxx</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Pendanaan	xxx
<b>Arusk Kas Bersih yang Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>xxx</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>xxx</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>xxx</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>xxx</b>

Sumber: Universitas Indonesia (2014).

Komponen dalam laporan arus kas tersebut adalah sebagaimana ditetapkan dalam PSAK 2 (Revisi 2013) tentang Laporan Arus Kas sebagai berikut.

a. Aktivitas operasi

Aktivitas operasi adalah Aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Contoh aliran kas masuk dari aktivitas operasi antara lain adalah

- penerimaan dari penjualan barang/jasa, royalti, pendapatan lain;
- penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak; dan
- penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek.

Sedangkan contoh aliran kas keluar dari aktivitas operasi antara lain adalah

- pembayaran kepada pemasok barang dan jasa;
- pembayaran untuk karyawan;
- pembayaran klaim (asuransi), pembelian efek (perusahaan efek), pengembalian kredit (bank); dan
- pembayaran biaya operasi.

b. Aktivitas investasi

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Contoh aliran kas masuk dari aktivitas investasi antara lain adalah

- penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain;
- penerimaan kas dari kontrak future/ forward, future untuk pendanaan;
- penerimaan penjualan instrumen utang atau kas (selain diperdagangkan); dan
- penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain.

Sedangkan contoh aliran kas keluar dari aktivitas investasi antara lain adalah

- pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi;
- pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan; dan
- pembayaran untuk membeli instrumen utang/ekuitas/ ventura selain untuk diperdagangkan.

c. Aktivitas pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Contoh aliran kas masuk dari aktivitas pendanaan antara lain adalah

- penerimaan kas dari penerbitan saham; dan
- penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, hipotek.

Sedangkan contoh aliran kas keluar dari aktivitas pendanaan antara lain adalah

- pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham;
- pelunasan pinjaman; dan
- pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan.

Di samping ketentuan dalam PSAK 2 tersebut, paragraf 34 PSAK 45 memberikan tambahan sebagai berikut.

a. Aktivitas pendanaan:

- penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang;
- penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi; dan
- bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.

b. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Aktivitas, Laporan Posisi Keuangan, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Keuangan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

PSAK 1 (Revisi 2013) tentang Penyajian Laporan Keuangan menjelaskan bahwa catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut.

- a. Informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, seperti dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi;
- b. Informasi yang disyaratkan Standar Akuntansi Keuangan yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan;
- c. Informasi yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

### 2.2.2 Jurnal-Jurnal Standar

- a. Jurnal penerimaan pendapatan pendaftaran ujian masuk D3

Bank tidak terikat	xxx	
Pendapatan tidak terikat-pendaftaran ujian masuk D3		xxx

- b. Jurnal penerimaan pendapatan SPP

Bank tidak terikat	xxx	
Pendapatan tidak terikat-SPP		xxx

- c. Jurnal penerimaan pendapatan sewa gedung

Bank tidak terikat	xxx	
Pendapatan tidak terikat-Sewa Gedung		xxx

- d. Jurnal penerimaan pendapatan hibah luar negeri terikat temporer

Bank terikat temporer	xxx	
Pendapatan terikat tempore-hibah luar negeri		xxx

- e. Jurnal penerimaan pendapatan hibah dalam negeri terikat permanen

Bank terikat permanen	xxx	
Pendapatan terikat permanen-hibah dalam negeri		xxx

- f. Jurnal pembayaran beban honorarium mengajar

Beban tidak terikat-honorarium mengajar	xxx	
Bank tidak terikat		xxx

- g. Jurnal pembayaran honorarium penyelenggaraan ujian skripsi

Beban tidak terikat-penyelenggaraan ujian skripsi	xxx	
Bank tidak terikat		xxx

- h. Jurnal pembayaran honorarium penelitian terkait hibah luar negeri terikat temporer

Beban terikat temporer-honorarium penelitian	xxx	
Bank terikat temporer		xxx

- i. Jurnal penempatan dana hibah dalam negeri terikat permanen pada investasi deposito 12 bulan

Investasi terikat permanen-deposito 12 bulan	xxx	
Bank terikat permanen		xxx

### 2.3 Penyusunan Laporan Keuangan Universitas BLU

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, Universitas BLU diwajibkan menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah. Dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja).

Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan

barang/jasa. Kepada BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Tetapi sebagai pengimbang, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggung jawabannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, BLU wajib menghitung harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis pembina.

Demikian pula dalam pertanggung jawabannya, BLU harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan. Oleh karena itu, BLU berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya. Kedua belah pihak menandatangani kontrak kinerja (*a contractual performance agreement*), dimana menteri/ pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, dan BLU bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang diminta.

Satuan kerja yang ditetapkan sebagai BLU mempunyai kewajiban untuk menyusun 2 (dua) laporan keuangan yaitu laporan keuangan berdasarkan SAK dan laporan keuangan berdasarkan SAP. Pembahasan terkait pelaporan keuangan universitas yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

### **2.3.1 Format Laporan Keuangan**

#### **1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Universitas BLU**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, laporan keuangan universitas BLU disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan. BLU setidaknya mengembangkan tiga sistem akuntansi yang merupakan sub sistem dari sistem akuntansi BLU, yaitu sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi aset tetap, dan sistem akuntansi biaya.

Sistem Akuntansi Keuangan menghasilkan laporan keuangan pokok berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan



oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia /standar akuntansi industri spesifik dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan sesuai dengan SAK digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada pengguna umum laporan keuangan BLU dalam hal ini adalah *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan BLU. Sedangkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP digunakan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan BLU dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

Sistem Akuntansi Aset Tetap menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset. Sistem ini menyajikan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU ataupun bukan milik BLU tetapi berada dalam pengelolaan BLU. Pengembangan Sistem Akuntansi Aset Tetap diserahkan sepenuhnya kepada BLU yang bersangkutan. Namun demikian, BLU dapat menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

BLU mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya yang menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, dan evaluasi varian. Sistem Akuntansi Biaya berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan.

## 2. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Menurut PMK Nomor 76/PMK.05/2008, Tujuan utama neraca adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:

- a. Kemampuan BLU dalam memberikan jasa layanan secara berkelanjutan
- b. Likuiditas dan Solvabilitas
- c. Kebutuhan Pendanaan Eksternal

Format laporan posisi keuangan bagi universitas BLU yang disusun berdasarkan PMK Nomor 76/PMK.05/2008 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4 Format Neraca Universitas BLU

<b>BLU Universitas XYZ</b> <b>Neraca</b> <b>Per 31 Desember 20xx</b> (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
<b>ASET</b>	
<b>Aset Lancar</b>	
Kas dan Setara Kas	xxx
Bank	xxx
Piutang Usaha	xxx
Persediaan	xxx
Biaya dibayar dimuka	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>xxx</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>	
Investasi Jangka Panjang	xxx
Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan)	xxx
Aset Lain-lain	xxx
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>xxx</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>xxx</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Hutang Pajak	xxx
Biaya yang Masih Harus Dibayar	xxx
Hutang Lain-lain	xxx
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>xxx</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Hutang Lain-lain	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx
Uang Muka PPN	xxx
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>xxx</b>
<b>Ekuitas Tidak Terikat</b>	
Ekuitas Awal	xxx
Surplus dan Defisit Tahun Lalu	xxx
Surplus dan Defisit Tahun Berjalan	xxx
Ekuitas Donasi	xxx

<b>Jumlah Ekuitas Tidak Terikat</b>	<b>xxx</b>
<b>Ekuitas Terikat Temporer</b>	xxx
<b>Ekuitas Terikat Permanen</b>	xxx
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>xxx</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>xxx</b>
Sumber: Laporan Keuangan ( <i>Audited</i> ) Universitas Soedirman Tahun 2011	

Karakteristik yang membedakan laporan posisi keuangan adalah pada ekuitas di neraca. Ekuitas adalah hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri atas:

a. Ekuitas Tidak Terikat

Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Ekuitas tidak terikat dinilai sebesar nilai buku ekuitas tidak terikat pada saat penetapan BLU. Contoh ekuitas tidak terikat meliputi:

1) Surplus dan Defisit Tahun Lalu

Surplus dan Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus & Defisit pada periode-periode sebelumnya.

2) Surplus dan Defisit Tahun Berjalan

Surplus dan Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

b. Ekuitas Terikat Temporer

Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh BLU. Ekuitas terikat temporer diukur sebesar aset lancar non kas dikurangi total kewajiban baik kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

c. Ekuitas Terikat Permanen

Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donatur. Ekuitas terikat permanen di BLU meliputi:

- 1) Aset tetap sebelum dilaksanakan revaluasi yang diukur sebesar nilai buku pada saat penetapan BLU.
- 2) Kenaikan aset tetap hasil revaluasi yang diukur dengan nilai wajar pada saat revaluasi aset.
- 3) Aset lainnya. Ekuitas terikat permanen ini diukur sebesar nilai buku pada saat penetapan BLU.

### 3. Laporan Realisasi Anggaran

Berikut merupakan penjelasan mengenai Laporan Realisasi Anggaran menurut PMK Nomor 76/PMK.05/2008, yaitu:

- a. LRA menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLU secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Format laporan realisasi anggaran bagi universitas BLU yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.5 Format Laporan Realisasi Anggaran

	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	(%)	Realisasi 20x0
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>Pendapatan Jasa dan Layanan</b>				
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	xxx	xxx	xx	xxx
Pendapatan Jasa Layanan Lain	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pendapatan Jasa dan Layanan	xxx	xxx	xx	xxx
<b>Hibah</b>				
Hibah Terikat	xxx	xxx	xx	xxx
Hibah Tidak Terikat	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
<b>Pendapatan APBN</b>				
Operasional	xxx	xxx	xx	xxx
Investasi	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pendapatan APBN	xxx	xxx	xx	xxx

<b>Pendapatan Usaha Lainnya</b>				
Hasil Kerja Sama	xxx	xxx	xx	xxx
Sewa	xxx	xxx	xx	xxx
Jasa Lembaga Keuangan	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
<b>Jumlah Pendapatan</b>				
<b>BELANJA</b>				
Belanja APBN	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Layanan	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Umum dan Administrasi	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Belanja	xxx	xxx	xx	xxx
Surplus/Defisit	xxx	xxx	xx	xxx
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan				
Penerimaan Pinjaman Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Pinjaman – Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	xxx	xxx	xx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan			xx	
Pembayaran Pokok Pinjaman Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman – Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	xxx	xxx	xx	xxx
Pembiayaan Neto	xxx	xxx	xx	xxx
Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan	xxx	xxx	xx	xxx

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Laporan Operasional menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Biaya adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Surplus/defisit

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama satu periode pelaporan.

4. Laporan Operasional

- a. Laporan Operasional menyajikan informasi tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU. Laporan operasional dapat berupa laporan aktivitas atau laporan surplus defisit.
- b. Informasi dalam LRA dan Laporan Operasional, digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam komponen laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk:
  - 1) Mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi
  - 2) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
  - 3) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja BLU dalam hal efisiensi dan efektifitas pengguna anggaran.
  - 4) Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Format Laporan Operasional bagi universitas BLU yang disusun berdasarkan PMK Nomor 76/PMK.05/2008 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.6 Format Laporan Operasional Universitas BLU

<b>BLU Universitas XYZ</b> <b>Laporan Operasional</b> <b>Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx</b> (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
<b>PENDAPATAN</b>	
<b>Pendapatan Jasa dan layanan</b>	
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	xxx
Pendapatan Jasa Layanan Lain	xxx
	xxx
<b>Hibah</b>	
Hibah Terikat	xxx
Hibah Tidak Terikat	xxx
	xxx
<b>Pendapatan APBN</b>	
Operasional	xxx
Investasi	xxx
	xxx
<b>Pendapatan Usaha Lainnya</b>	
Hasil Kerja Sama Dengan Pihak Lain	xxx
Sewa	xxx
Jasa Lembaga Keuangan	xxx
	xxx
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>xxx</b>
<b>Biaya</b>	
Biaya APBN	xxx
Biaya Layanan	xxx
Biaya Umum dan Administrasi	xxx
<b>Jumlah Biaya</b>	<b>xxx</b>
<b>Surplus/Defisit Sebelum Keuntungan/Kerugian</b>	<b>xxx</b>
<b>Keuntungan/Kerugian</b>	
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	xxx
Rugi Penjualan Aset Tetap	xxx
Rugi Penurunan Nilai	xxx
<b>Jumlah Keuntungan/Kerugian</b>	<b>xxx</b>
<b>Surplus/Defisit Sebelum Pos-Pos Luar Biasa</b>	<b>xxx</b>
<b>Pos-Pos Luar Biasa</b>	
Pendapatan dan Kejadian Luar Biasa	xxx

Biaya dan Kejadian Luar Biasa	xxx
<b>Jumlah Pos-Pos Luar Biasa</b>	<b>xxx</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN BERSIH</b>	<b>xxx</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN DILUAR PENDAPATAN APBN</b>	<b>xxx</b>
Sumber: Laporan Keuangan ( <i>Audited</i> ) Universitas Soedirman Tahun 2011	

Laporan Operasional menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas operasional selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

b. Biaya

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.

5. Laporan Arus Kas

Menurut PMK Nomor 76/PMK.05/2008, tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Infomasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan inforamsi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:

- Kemampuan BLU dalam menghasilkan kas dan setara kas
- Sumber dana BLU
- Penggunaan dana BLU
- Prediksi kemampuan BLU untuk memperoleh sumber dana serta pengunannya di masa yang akan datang.

Format Laporan Arus Kas sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 76/PMK.05/2008 adalah sebagaimana diilustrasikan dalam gambar 2.7 berikut.



Gambar 2.7 Format Laporan Arus Kas Universitas BLU

<b>BLU Universitas XYZ</b> <b>Laporan Arus Kas</b> <b>Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx</b> (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>xxx</b>
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	xxx
Pendapatan Hibah	xxx
Pendapatan APBN (Rupiah Murni)	xxx
Pendapatan Usaha Lainnya	xxx
<b>Arus Kas Keluar</b>	
Belanja APBN	xxx
Biaya Layanan	xxx
Biaya Umum dan Administrasi	xxx
Pengeluaran Investasi Jangka Pendek	xxx
Biaya Lainnya	xxx
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>xxx</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>xxx</b>
Hasil Penjualan Aset Tetap	xxx
Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang	xxx
Hasil Penjualan Aset Lainnya	xxx
<b>Arus Kas Keluar</b>	
Perolehan Aset Tetap	xxx
Perolehan Investasi Jangka Panjang	xxx
Perolehan Aset Lainnya	xxx
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>xxx</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>xxx</b>
Tambahan Ekuitas Awal	xxx
<b>Arus Kas Keluar</b>	
Penyetoran Kembali ke Kas Negara	xxx

Penurunan Ekuitas Awal	xxx
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>xxx</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>xxx</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>xxx</b>
<b>JUMLAH SALDO KAS</b>	<b>xxx</b>
Sumber: Laporan Keuangan ( <i>Audited</i> ) Universitas Soedirman Tahun 2011	

#### 6. Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut PMK Nomor 76/PMK.05/2008, tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LRA/laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU.

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup antara lain:

- 1) Pendahuluan,
- 2) Kebijakan Akuntansi
- 3) Penjelasan atas pos-pos lapran Realisasi Anggaran/ Laporan Operasional
- 4) Penjelasan atas pos-pos neraca
- 5) Kewajiban Kontijensi
- 6) Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

Laporan keuangan pokok diatas disertai dengan Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang berisikan ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program yang disusun dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK ditujukan agar laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. CaLK sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- e. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- f. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Bagian kebijakan akuntansi pada CaLK setidaknya-tidaknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi SAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
- c. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Untuk menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan pendapatan;
- b. Pengakuan belanja;

- c. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- d. Investasi;
- e. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- f. Kontrak-kontrak konstruksi;
- g. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- h. Kemitraan dengan pihak ketiga;
- i. Biaya penelitian dan pengembangan;
- j. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- k. Dana cadangan;
- l. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Suatu entitas pelaporan juga dapat mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

### 2.3.2 Jurnal-Jurnal Standar

Di bawah ini merupakan contoh jurnal standar yang khas dilakukan oleh Universitas BLU berdasarkan PMK Nomor 76/PMK.05/2008.

- a. Pendapatan Badan Layanan Umum Tunai

Kas di Bendahara Penerimaan ...	xxx	
Pendapatan Badan Layanan Umum .....		xxx

- b. Pendapatan Badan Layanan Umum Kredit

Piutang di Bendahara Penerimaan ...	xxx	
Pendapatan Badan Layanan Umum .....		xxx

- c. Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Tunai

Kas di Bendahara Penerimaan ...	xxx	
Pendapatan Hibah Dalam dan Luar Negeri		xxx

d. Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Kredit

Piutang pada ...	xxx	
Pendapatan Hibah Dalam dan Luar Negeri		xxx

e. Pendapatan Hasil Usaha BLU lainnya Tunai

Kas di Bendahara Penerimaan ...	xxx	
Pendapatan Hasil Usaha BLU lainnya		xxx

f. Pendapatan Hasil Usaha BLU lainnya Kredit

Piutang pada ...	xxx	
Pendapatan Hasil Usaha BLU lainnya		xxx

g. Belanja Barang BLU Tunai

Belanja Barang BLU...	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

h. Belanja Barang BLU Tunai Kredit

Belanja Barang BLU...	xxx	
Utang pada ....		xxx

i. Belanja Modal BLU Tunai

Belanja Modal BLU...	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

j. Belanja Modal BLU Kredit

Belanja Modal BLU...	xxx	
Utang pada ....		xxx

## **BAB III**

### **SIMPULAN**

#### **3.1 Simpulan**

Saat ini ada dua kategori universitas pemerintah terkait pengelolaan keuangannya yaitu Universitas sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dan Universitas sebagai Badan Hukum. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom. Kesiapan untuk melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi secara otonom tersebut ditunjukkan melalui evaluasi diri yang menyeluruh baik dalam aspek program akademik, sumberdaya manusia (SDM), sarana-prasarana, maupun keuangan. Namun, pemberian otonomi tidak berarti pemerintah melepaskan diri dari tanggung jawab di bidang pendidikan. Jenis Laporan Keuangan Universitas PTN BH terdiri dari Laporan posisi keuangan (neraca), Laporan aktivitas, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan.

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat. Akuntansi dan laporan keuangan badan layanan umum diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Jenis Laporan Keuangan Universitas BLU terdiri dari Laporan posisi keuangan (neraca), Laporan realisasi anggaran/Laporan Operasional, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan.

Setiap Universitas baik PTN BH maupun BLU diharuskan melaksanakan pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Universitas BLU menerapkan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah (PMK Nomor 76/PMK.05/2008) sedangkan Universitas BHMN menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan universitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Laporan Keuangan UI Tahun 2013.

Laporan Keuangan UNSOED Tahun 2011.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Tahun Anggaran 2014.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

PSAK 1 (Revisi 2013) tentang Penyajian Laporan Keuangan.

PSAK 2 (Revisi 2013) tentang Laporan Arus Kas.

PSAK 45 (Revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1: Laporan Keuangan Universitas Indonesia Tahun 2013 (*Audited*)

Lampiran 2: Laporan Keuangan Universitas Jenderal Soedirman 2011 (*Audited*)



**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
***STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***

**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012**  
*(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2013	Catatan/ Notes	2012	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>Aset Lancar</b>				<b>Current Assets</b>
Kas dan Setara Kas	1.601.637.953.696	2f, 3	1.299.516.597.420	Cash and Cash Equivalents
Uang Muka	58.971.818.680	4	75.142.444.132	Advances
Investasi Jangka Pendek	10.182.992.153	2g, 5	10.189.858.460	Short-Term Investments
Piutang (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu Rp. 9.936.492.889,- pada tahun 2013 dan Rp. 10.523.497.087,- pada tahun 2012)	48.023.161.901	2h, 6	48.996.642.110	Receivables (net of allowance for doubtful account of Rp. 9.936.492.889,- in 2013 and Rp. 10.523.497.087,- in 2012)
Biaya Dibayar di Muka	1.665.901.031	7	1.661.616.340	Prepaid Expenses
Persediaan	6.849.282.954	2i, 8	3.793.316.574	Inventories
Jumlah Aset Lancar	1.727.331.110.415		1.439.300.475.036	Total Current Assets
<b>Aset Tidak Lancar</b>				<b>Non-Current Assets</b>
Investasi Jangka Panjang	11.310.061.810	2j, 9	11.102.980.191	Long-Term Investments
Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp. 769.015.104.984,- pada tahun 2013 dan Rp. 651.872.217.248,- pada tahun 2012)	7.164.292.966.867	2k, 10	7.010.211.506.159	Fixed Assets (net of accumulated depreciation of Rp. 769.015.104.984,- in 2013 and Rp. 651.872.217.248,- in 2012)
Aset Lain-lain	39.481.104.011	11	33.595.497.585	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	7.215.084.132.688		7.054.909.983.935	Total Non-Current Assets
<b>Jumlah Aset</b>	<b>8.942.415.243.103</b>		<b>8.494.210.458.971</b>	<b>Total Assets</b>

**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012**  
*(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2013	Catatan/ Notes	2012	
<b>LIABILITAS DAN ASET NETO</b>				<b>LIABILITIES AND NET ASSETS</b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				<b>Current Liabilities</b>
Hutang Pajak	13.624.968.839	12	18.640.559.301	<i>Taxes Payable</i>
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	5.144.682.265	13	6.559.027.379	<i>Accrued Expenses</i>
Hutang Lain-lain	85.830.209.468	14	50.185.642.055	<i>Other Payables</i>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	104.599.860.572		75.385.228.735	<i>Total Current Liabilities</i>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				<b>Non-Current Liabilities</b>
Hutang Lain-lain	304.301.440	14	499.651.300	<i>Other Payables</i>
Pendapatan Diterima di Muka	44.267.349.076	15	46.247.829.541	<i>Unearned Revenues</i>
Kewajiban Imbalan Pascakerja	27.339.461.173	21, 16	35.224.671.673	<i>Post-Employment Benefits Obligation</i>
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	71.911.111.689		81.972.152.514	<i>Total Non-Current Liabilities</i>
<b>Aset Neto</b>				<b>Net Assets</b>
Aset Neto Tidak Terikat	2.774.877.562.206	17	2.405.054.402.469	<i>Unrestricted Net Assets</i>
Aset Neto Terikat Temporer	136.183.589.636	18	79.109.301.253	<i>Temporary Restricted Net Assets</i>
Aset Neto Terikat Permanen	5.854.843.119.000	19	5.852.689.374.000	<i>Permanent Restricted Net Assets</i>
Jumlah Aset Neto	8.765.904.270.842		8.336.853.077.722	<i>Total Net Assets</i>
<b>Jumlah Liabilitas dan Aset Neto</b>	<b>8.942.415.243.103</b>		<b>8.494.210.458.971</b>	<b>Total Liabilities and Net Assets</b>

**LAPORAN AKTIVITAS**  
***STATEMENTS OF ACTIVITIES***

**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**LAPORAN AKTIVITAS**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2013 DAN 2012**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**STATEMENTS OF ACTIVITIES**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2013 AND 2012**  
*(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2013	Catatan/ Notes	2012	
<b>PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT</b>				<b>CHANGES IN UNRESTRICTED NET ASSETS</b>
<b>Pendapatan</b>				<b>Revenues</b>
Operasional	1.160.791.580.072	2m, 20	1.172.532.172.862	Operating
APBN	650.533.118.574	2m, 20	529.318.827.486	APBN
Hibah/ Sumbangan	93.774.852.291	2m, 20	71.132.576.630	Grants/ Donations
Lain-lain	97.543.028.042	2m, 20	50.179.619.975	Others
	<u>2.002.642.578.979</u>		<u>1.823.163.196.953</u>	
Aset Neto yang Berakhir Pembatasannya	7.335.431.153	20	5.938.565.177	Net Assets Ended of Restrictions
Jumlah Pendapatan	<u>2.009.978.010.132</u>		<u>1.829.101.762.130</u>	Total Revenues
<b>Beban</b>				<b>Expenses</b>
Operasional	1.493.784.202.319	2m, 21	1.309.775.575.062	Operating
Penyusutan dan Amortisasi	118.103.904.773	2m, 21	118.073.555.470	Depreciation and Amortization
Lain-lain	25.712.819.706	2m, 21	29.676.511.073	Others
Jumlah Beban	<u>1.637.600.926.798</u>		<u>1.457.525.641.605</u>	Total Expenses
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat	<u>372.377.083.334</u>		<u>371.576.120.525</u>	Increase (Decrease) in Unrestricted Net Assets
<b>PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER</b>				<b>CHANGES IN TEMPORARY RESTRICTED NET ASSETS</b>
<b>Pendapatan</b>				<b>Revenues</b>
Operasional	7.744.048.413	2m, 22	3.342.887.217	Operating
Hibah/ Sumbangan	55.531.496.670	2m, 22	45.634.426.190	Grants/ Donations
Lain-lain	1.134.174.454	2m, 22	102.163.044	Others
	<u>64.409.719.537</u>		<u>49.079.476.451</u>	
Aset Neto Terbebaskan dari Pembatasan	(7.335.431.153)	22	(5.938.565.177)	Net Assets Released from Restrictions
Jumlah Pendapatan	<u>57.074.288.384</u>		<u>43.140.911.274</u>	Total Revenues
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Terikat Temporer	<u>57.074.288.384</u>		<u>43.140.911.274</u>	Increase (Decrease) in Temporary Restricted Net Assets

**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**LAPORAN AKTIVITAS**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2013 DAN 2012**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**STATEMENTS OF ACTIVITIES**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2013 AND 2012**  
*(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2013	Catatan/ Notes	2012	
<b>PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN</b>				<b>CHANGES IN PERMANENT RESTRICTED NET ASSETS</b>
<b>Pendapatan</b>				<b>Revenues</b>
Lain-lain	2.153.745.000	2m, 23	514.710.000	<i>Others</i>
	<u>2.153.745.000</u>		<u>514.710.000</u>	
Aset Neto Terbebaskan dari Pembatasan	0	23	0	<i>Net Assets Released from Restrictions</i>
Jumlah Pendapatan	<u>2.153.745.000</u>		<u>514.710.000</u>	<i>Total Revenues</i>
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Terikat Permanen	<u>2.153.745.000</u>		<u>514.710.000</u>	<i>Increase (Decrease) in Permanent Restricted Net Assets</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</b>	<b><u>431.605.116.718</u></b>		<b><u>415.231.741.799</u></b>	<b>INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS</b>
ASET NETO AWAL TAHUN	8.336.853.077.722		7.925.344.715.726	<i>NET ASSETS AT THE BEGINNING OF YEAR</i>
Koreksi Saldo Awal	(2.578.044.391)		(3.802.190.482)	<i>Adjustment of Beginning Balance</i>
Kenaikan (Penurunan) Efek Tersedia untuk Dijual	24.120.793	24	78.810.679	<i>Increase (Decrease) In Available for Sale of Securities</i>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b><u>8.765.904.270.842</u></b>		<b><u>8.336.853.077.722</u></b>	<b>NET ASSETS AT THE END OF YEAR</b>

**LAPORAN ARUS KAS**  
***STATEMENTS OF CASH FLOWS***

**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2013 DAN 2012**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2013 AND 2012**  
*(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2013	2012	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Kenaikan Aset Neto	431.605.116.718	415.231.741.799	<i>Increase in Net Assets</i>
Penyesuaian:			<i>Adjustments:</i>
Penyusutan	118.103.904.773	118.073.555.470	<i>Depreciation</i>
Koreksi Aset Neto	(2.578.044.391)	(3.802.190.482)	<i>Adjustment of Net Assets</i>
Imbalan Pascakerja	(7.885.210.500)	16.063.801.067	<i>Post-Employment Benefits</i>
Laba (Rugi) Efek Tersedia untuk Dijual	24.120.793	78.810.679	<i>Gains (Losses) in Available for Sale Securities</i>
Perubahan Modal Kerja:			<i>Changes in Work Capital:</i>
Uang muka	16.170.625.452	(4.219.626.287)	<i>Advances</i>
Piutang	973.480.208	(5.646.165.092)	<i>Receivables</i>
Biaya Dibayar di Muka	(4.284.691)	1.440.200.042	<i>Prepaid Expenses</i>
Persediaan	(3.055.966.380)	(1.860.491.711)	<i>Inventories</i>
Aset Lain-lain	(5.885.606.426)	3.186.179.645	<i>Other Assets</i>
Hutang Pajak	(5.015.590.463)	2.388.156.961	<i>Taxes Payable</i>
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(1.414.345.114)	(11.437.022.942)	<i>Accrued Expenses</i>
Hutang Lain-lain	35.449.217.555	7.711.780.992	<i>Other Payables</i>
Pendapatan Diterima di Muka	(1.980.480.465)	(2.118.609.769)	<i>Unearned Revenues</i>
Arus Kas Bersih yang Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Operasi	574.506.937.069	535.090.120.372	<i>Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Perolehan Efek Tersedia untuk Dijual dan Dimiliki hingga Jatuh Tempo	0	0	<i>Acquisition of Securities Available for Sale and Held to Maturity</i>
Pelepasan Efek Tersedia untuk Dijual dan Dimiliki hingga Jatuh Tempo	(200.215.312)	(1.977.917.265)	<i>Disposal of Securities Available for Sale and Held to Maturity</i>
Perolehan Aset Tetap	(272.185.365.481)	(244.337.046.425)	<i>Acquisition of Fixed Assets</i>
Arus Kas Bersih yang Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Investasi	(272.385.580.793)	(246.314.963.690)	<i>Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities</i>



**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2013 DAN 2012**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2013 AND 2012**  
*(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2013	2012	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Pendanaan	0	0	<i>Financing</i>
Arus Kas Bersih yang Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Pendanaan	0	0	<i>Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Financing</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>302.121.356.276</b>	<b>288.775.156.682</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>1.299.516.597.420</b>	<b>1.010.741.440.738</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>1.601.637.953.696</b>	<b>1.299.516.597.420</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***

## BLU UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED) PURWOKERTO

## N E R A C A

31 Desember 2011 Dan 2010

ASET	Catatan	2011	2010
<b>ASET LANCAR</b>			
KAS	3	0	0
BANK	3	Rp 60,890,930,750	Rp 48,446,944,102
PIUTANG USAHA	4	Rp 8,582,193,794	Rp 11,011,946,665
PERSEDIAAN	5	Rp 867,930,114	Rp 1,653,555,525
BIAYA DIBAYAR DIMUKA	6	Rp 750,000	Rp 9,972,195
INVESTASI JIWASRAYA SAVING PLAN "A"	7	Rp 20,000,000,000	Rp 20,000,000,000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>Rp 90,341,804,658</b>	<b>Rp 81,122,418,487</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 102,429,508,112.- dan Rp 43,777,763,343.-			
	8;2.i	Rp 1,799,111,775,112	Rp 1,741,748,196,564
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	9	Rp 696,480,000	Rp 353,500,000
		Rp 696,480,000	Rp 353,500,000
<b>TOTAL ASET</b>		<b>Rp 1,890,150,059,770</b>	<b>Rp 1,823,224,115,051</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
Utang Pajak	10	Rp 120,633,875	Rp 5,940,523
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	11	Rp 4,799,687,138	Rp 461,760,867
Pendapatan Diterima Dimuka	12	Rp 6,715,642,456	Rp 1,039,529,978
Uang Muka PPN	13	Rp 50,000	Rp -
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>Rp 11,636,013,469</b>	<b>Rp 1,507,231,368</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas Tidak Terikat</b>	14	<b>Rp 1,872,252,963,602</b>	<b>Rp 1,815,455,800,985</b>
Ekuitas Awal		Rp 1,646,253,907,348	Rp 1,714,934,350,828
Surplus dan Defisit Tahun Lalu		Rp 122,366,957,446	Rp -
Surplus Dan Defisit Tahun Berjalan		Rp 102,793,501,308	Rp 99,930,362,656
Ekuitas Donasi		Rp 838,597,500	Rp 591,087,500
<b>Ekuitas Terikat Temporer</b>	15	<b>Rp 140,519,036</b>	<b>Rp 140,519,036</b>
<b>Ekuitas Terikat Permanen</b>	16	<b>Rp 6,120,563,663</b>	<b>Rp 6,120,563,663</b>
<b>Total Ekuitas</b>		<b>Rp 1,878,514,046,301</b>	<b>Rp 1,821,716,883,684</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>Rp 1,890,150,059,770</b>	<b>Rp 1,823,224,115,051</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan  
Secara Keseluruhan

BLU UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN (UNSOED) PURWOKERTO  
LAPORAN AKTIVITAS  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2011 Dan 2010

	Catatan	2011	2010
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Jasa Layanan	17	Rp 123.515.803.720	Rp 122.379.858.535
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan		Rp 105.570.622.894	Rp 118.527.212.299
Pendapatan Jasa Layanan Lain		Rp 17.945.180.826	Rp 3.852.646.236
Hibah	18	Rp 22.123.659.383	Rp 18.872.032.845
Hibah Terikat		Rp 22.123.659.383	Rp 18.714.369.345
Hibah Tidak Terikat		Rp -	Rp 157.663.500
Pendapatan APBN	19	Rp 325.459.148.757	Rp 207.737.443.117
Operasional		Rp 227.849.938.461	Rp 129.061.449.100
Investasi		Rp 97.609.210.296	Rp 78.675.994.017
Pendapatan Usaha Lainnya	20	Rp 4.257.959.739	Rp 1.786.245.383
Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain			Rp -
Sewa		Rp 809.391.477	Rp 317.639.912
Jasa Lembaga Keuangan		Rp 3.448.568.262	Rp 1.468.605.471
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>Rp 475.356.571.599</b>	<b>Rp 350.775.579.880</b>
<b>BIAYA</b>			
Biaya APBN	21	Rp 227.849.938.461	Rp -
Biaya Pegawai		Rp 112.378.096.489	Rp -
Biaya Barang		Rp 101.920.241.972	Rp -
Biaya Modal		Rp -	Rp -
Biaya Bantuan Sosial		Rp 13.551.600.000	Rp -
Biaya Layanan		Rp 64.449.899.144	Rp 175.000.686.819
Biaya pegawai	22	Rp 27.983.558.923	Rp 109.367.413.981
Biaya Bahan	23	Rp 10.939.347.418	Rp 26.252.562.120
Biaya Pemeliharaan	24	Rp 1.827.953.301	Rp 1.525.054.841
Biaya Langganan Daya dan Jasa	25	Rp 178.509.197	Rp 1.825.492.222
Biaya Perjalanan	26	Rp 1.191.059.862	Rp 1.057.857.370
Biaya Layanan Lainnya	27	Rp 22.329.470.443	Rp 34.972.306.285
Biaya Umum dan Administrasi		Rp 80.263.232.687	Rp 75.844.530.405
Biaya Pegawai	28	Rp 9.191.164.440	Rp 13.506.300.418
Biaya Administrasi Perkantoran	29	Rp 3.207.878.412	Rp 5.923.320.517
Biaya Pemeliharaan	30	Rp 4.232.802.317	Rp 3.396.349.614
Biaya Langganan Daya dan Jasa	31	Rp 335.486.160	Rp 851.041.395
Biaya Perjalanan	32	Rp 1.811.640.995	Rp 1.403.371.146
Biaya Promosi	33	Rp 16.920.000	Rp 1.078.203.115
Biaya Penyusutan	34	Rp 58.651.744.768	Rp 43.777.763.343
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya	35	Rp 2.815.595.595	Rp 5.908.180.857
<b>JUMLAH BIAYA</b>		<b>Rp 372.563.070.292</b>	<b>Rp 250.845.217.224</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM KEUNTUNGAN/KERUGIAN</b>		<b>Rp 102.793.501.308</b>	<b>Rp 99.930.362.656</b>
<b>KEUNTUNGAN/KERUGIAN</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
Keuntungan Penjualan Aset Tetap		Rp -	Rp -
Rugi Penjualan Aset Tetap		Rp -	Rp -
Rugi Penurunan Nilai		Rp -	Rp -
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA</b>		<b>Rp 102.793.501.308</b>	<b>Rp 99.930.362.656</b>
<b>POS-POS LUAR BIASA</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
Pendapatan dan Kejadian Luar Biasa		Rp -	Rp -
Biaya dan Kejadian Luar Biasa		Rp -	Rp -
<b>SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN BERSIH</b>		<b>Rp 102.793.501.308</b>	<b>Rp 99.930.362.656</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN DILUAR PENDAPATAN APBN</b>		<b>Rp 5.184.291.011</b>	<b>Rp 21.254.368.639</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan  
Secara Keseluruhan



LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2011 Dan 2010

URAIAN	2011	2010
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>Rp 477,786,324,470</b>	<b>Rp 350,775,579,880</b>
<i>Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan</i>	<i>Rp 123,515,803,720</i>	<i>Rp 122,379,858,535</i>
<i>Pendapatan Hibah</i>	<i>Rp 22,123,659,383</i>	<i>Rp 18,872,032,845</i>
<i>Pendapatan APBN (Rupiah Murni)</i>	<i>Rp 325,459,148,757</i>	<i>Rp 207,737,443,117</i>
<i>Pendapatan Usaha Lainnya</i>	<i>Rp 6,687,712,610</i>	<i>Rp 1,786,245,383</i>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>Rp 302,987,695,817</b>	<b>Rp 247,330,430,600</b>
<i>Belanja APBN</i>	<i>Rp 227,849,938,461</i>	<i>Rp -</i>
<i>Biaya Layanan</i>	<i>Rp 64,449,899,144</i>	<i>Rp 162,738,456,692</i>
<i>Biaya Umum dan Administrasi</i>	<i>Rp 10,687,858,212</i>	<i>Rp 32,066,767,062</i>
<i>Pengeluaran Investasi Jangka Pendek (Jiwasraya Saving Plan "A")</i>	<i>Rp -</i>	<i>Rp 20,000,000,000</i>
<i>Biaya Lainnya</i>	<i>Rp -</i>	<i>Rp 32,525,206,846</i>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Rp 174,798,628,653</b>	<b>Rp 103,445,149,280</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
<i>Hasil Penjualan Aset Tetap</i>	<i>Rp -</i>	<i>Rp -</i>
<i>Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang</i>	<i>Rp -</i>	<i>Rp -</i>
<i>Hasil Penjualan Aset lainnya</i>	<i>Rp -</i>	<i>Rp -</i>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>Rp 116,358,303,317</b>	<b>Rp 101,062,836,511</b>
<i>Perolehan Aset Tetap</i>	<i>Rp 116,015,323,317</i>	<i>Rp 99,942,134,746</i>
<i>Perolehan Investasi jangka panjang</i>	<i>Rp -</i>	<i>Rp -</i>
<i>Perolehan Aset Lainnya</i>	<i>Rp 342,980,000</i>	<i>Rp 1,120,701,765</i>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>	<b>Rp (116,358,303,317)</b>	<b>Rp (101,062,836,511)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>Rp 22,684,104,791</b>	<b>Rp 46,543,449,588</b>
<i>Tambahan Ekuitas Awal</i>	<i>Rp 22,684,104,791</i>	<i>Rp 46,543,449,588</i>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>Rp 68,680,443,480</b>	<b>Rp 528,039,232</b>
<i>Penyetoran kembali ke kas negara</i>	<i>Rp 1,922,123,791</i>	<i>Rp 528,039,232</i>
<i>Penurunan ekuitas awal</i>	<i>Rp 66,758,319,689</i>	<i>Rp -</i>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>Rp (45,996,338,689)</b>	<b>Rp 46,015,410,356</b>
<b>Kenaikan Bersih Kas</b>	<b>Rp 12,443,986,648</b>	<b>Rp 48,397,723,125</b>
<b>Kas dan setara Kas Awal</b>	<b>Rp 48,446,944,102</b>	<b>Rp 49,220,977</b>
<b>Jumlah Saldo Kas</b>	<b>Rp 60,890,930,750</b>	<b>Rp 48,446,944,102</b>

Catatan atas laporan Keuangan merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan  
secara keseluruhan